

BAB III

PROFIL NAGARI GUNUNG PADANG KABUPATEN PADANG PARIAMAN

3.1. Letak Geografis Nagari Gunung Padang Alai Kabupaten Padang Pariaman

Nagari adalah sebuah pemerintahan yang dipimpin oleh seorang wali nagari merupakan system pemerintahan yang ditetapkan oleh pemimpin Sumatera Barat di era kemerdekaan Republik Indonesia. Nagari Gunung Padang Alai adalah nagari yang terletak di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Nagari ini merupakan nagari terujung di Kecamatan V Koto Timur.

Menurut Urang Tuo di Nagari Gunung Padang Alai, Padang Alai telah berdiri pada tahun 1890 an, Asal mula nama Padang Alai adalah *Simbu Sialangan*. Di tengah-tengah Pasar tumbuhlah sebatang pohon besar yang dinamakan pohon Alai, akar dari pohon tersebut menjalar sampai kerumah penduduk. Jadi, karena dulu namanya simbu sialangan dan di Pasar ditemukan pohon yang sangat besar terletak di pergunungan, maka Ninik Mamak di Nagari tersebut sepakat merubah nama Nagari tersebut menjadi Nagari Gunung Padang Alai.

Bukti dengan adanya Nagari Gunung Padang Alai yaitu:

- a. Simbu sialangan yaitu sebuah sumber mata air yang tumbuh di perkarangan masjid, dan sampai sekarang simbu itu masih ada.
- b. Alai yaitu pohon yang sangat besar yang tumbuh di tengah-tengah pasar, dalam tiga tahun belakang masih ditemukan akar dari pohon alai tersebut.

Secara administratif pemerintahan Nagari Gunung Padang Alai berbatasan dengan, sebelah utara nagari malalak barat, sebelah selatan nagari kudu ganting, sebelah timur nagari padang sago, sebelah barat nagari cimapago/ sikucur.

Secara geografis Nagari Gunung Padang Alai terletak disuatu Nagari terluas pada bagian Utara Kabupaten Padang Pariaman. Berdasarkan data terakhir yang diterbitkan oleh Direktorat Bina Program Direktorat Jendral penyiapan pemukiman departemen transmigrasi 2003 bahwa ketinggian daerah Nagari Gunung Padang Alai berada pada 100-250 m dengan suhu 42 berkisar 25 Celcius sampai dengan 30 Celcius iklim sedang, permukaan tanah umumnya daratan, berbukit-bukit, dan lembah.

Secara administratif luas Nagari Gunung Padang Alai adalah 13.675 Ha yang terdiri dari 9 korong. Secara geografis Nagari Gunung Padang Alai pada dasarnya sangat pontensial untuk dikembangkan sebagai daerah perkebunan dan perdagangan karena posisi strategisnya berada pada pusat Kecamatan V Koto Timur dan berdampingan dengan Kabupaten Agam tidak jauh dari Kota Pariaman.

Tabel 3.1
Tabel Kondisi Geografis

No.	Uraian	Keterangan
1	Luas Wilayah	48.41(km ²
2	Jumlah Korong	9 Korong
3	Curah hujan rata -rata	2000/3000 mm
4	Keadaan suhu rata -rata	27-30 C

Sumber, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Tahun 2012-2016

Topografi adalah gambaran tentang tingkat kemiringan dan ketinggian tanah dari permukaan laut. Kondisi kemiringan tanah merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kesesuaian lahan untuk syarat tumbuh suatu tanaman. Berdasarkan data terakhir pemetaan Nagari Gunung Padang Alai kondisi daerah didominasi oleh topografi datar dengan luas 1. 567 Ha dan landai 31. 711 Ha, agak curam 75 Ha, curam 120 Ha, serta topografi sangat curam 94 Ha. Untuk lebih jelasnya tentang kondisi kemiringan lahan daerah Nagari Gunung Padang Alai dapat dilihat pada table 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Luas dan Kemiringan Daerah

No.	Topografi	Kemiringan	Luas (Ha)
1	Datar	0-45 %	15.670
2	Landai	45-90 %	31.711
3	Agak curam	90-94 %	75
4	Curam	94-98 %	120
5	Sangat curam	>98 %	94
	Total		49.670

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Tahun 2012-2016

Daerah ini menggambarkan bahwa Daerah Padang Alai relative masih sangat potensial untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Karena di samping budidaya pertanian dan perkebunan rakyat yang digunakan masyarakat masih tergolong tradisional dan juga masih digunakan adanya lahan-lahan tidur yang ditingkatkan sebagai lahan produktif. Nagari Gunung Padang Alai mempunyai potensi diantaranya:

1. Bidang perkebunan, yaitu perkebunan kelapa, coklat, pinang, sawit, pisang dan lain-lain. Yang mana masyarakat tidak terfokus pada satu tanaman saja.
2. Bidang pertanian, yaitu padi sawah dimana pengolahan padi di Nagari Gunung Padang Alai masih banyak memakai system semi tradisional.
3. Bidang peternakan, yaitu beternak sapi, kerbau kambing, ayam, ikan.
4. Bidang perekonomian, yaitu Home Industri yaitu industry mukenah dan industri perabot rumah tangga.

3.2. Kependudukan Masyarakat di Nagari Gunung Padang Alai Kabupaten Padang Pariaman

Nagari Gunung Padang Alai dengan jumlah penduduk sebesar 5.512 jiwa merupakan daerah terbesar penduduknya bila dibandingkan dengan nagari yang lain di Kecamatan V Koto Timur, bila dilihat dari tingkat pertumbuhan penduduk Nagari Gunung Padang Alai pada dasarnya

mempunyai tingkat pertumbuhan penduduk yang relative kecil yaitu 5.6 % pada tahun 2008. Berdasarkan data terakhir yang diterima dari laporan pengiriman mutasi penduduk Nagari Kudu Ganting pada tahun 2008 jumlah penduduk sebesar 5.080 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3

Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk di Nagari Gunung Padang Alai

No.	Korong	2013	2014	Rasio
1	Padang Alai	1.126	1.150	0.24
2	Sialangan	1.470	1.150	0.43
3	Patamuan	637	700	0.46
4	Koto Tinggi	1.014	1.034	1.62
5	Kayu Mudo	784	800	0.4
6	Kayu Angik	547	550	0.34
7	Batang Piaman	856	864	0.86
8	Kampung Tanjung	580	600	0.42
9	Gunung	565	700	0.59
	Jumlah	7.573	7.898	5.6

Sumber, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Tahun 2012- 2016

Tabel 3.4

Kondisi Sosial Budaya Nagari Gunung Padang Alai

NO	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Kependudukan		
	a. Jumlah penduduk (jiwa)	6.042	Belum Kawin 2.808 Kawin 2.600
	b. Jumlah KK	2.051	Cerai Hidup 164
	c. Jumlah laki-laki	3.079	Cerai Mati 470
	d. Jumlah perempuan	2.963	

2.	Kesejahteraan Sosial a. Jumlah KK prasejahtera b. Jumlah KK sejahtera c. Jumlah KK kaya d. Jumlah KK sedang e. Jumlah KK miskin	325 460 75 424 681	
3.	Tingkat Pendidikan a. Tidak tamat SD b. SD c. SLTP d. SLTA e. Diploma/ sarjana	936 1.967 947 832 47	
4.	Mata Pencaharian a. Buruh tani b. Petani c. Peternak d. Pedagang e. Tukang kayu f. Tukang batu g. Penjahit h. PNS i. Pensiunan j. TNI/Polri k. Perangkat nagari l. Pengrajin m. Industri kecil n. Buruh nagari o. Lain-lain	1.600 2.150 12 267 40 55 130 20 19 6 8 32 36 85 162	Pembuatanmukena Pembuatan kue
5.	Agama Islam	100%	Dibuktikan dengan adanya 13 mesjid dan 94 mushalla

Sumber Data: Kantor Wali Nagari Gunung Padang Alai

Dari tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa:

a. Kependudukan.

Jumlah usia produktif lebih banyak dibanding dengan usia anak-anak dan lansia. Perbandingan usia anak-anak, produktif, dan lansia adalah sebagai berikut: 21%: 61%: 18%. Dari 2004 jumlah penduduk yang berada pada kategori usia produktif laki-laki dan perempuan jumlahnya hampir sama/seimbang.

b. Kesejahteraan

Jumlah KK Sedang mendominasi yaitu 29,2% dari total KK, KK prasejahtera 24 %, KK sejahtera 17,9% KK Kaya 16,3%. dan KK Miskin 12,5%. Dengan banyaknya KK prasejahtera inilah maka Nagari Gunung Padang Alai termasuk dalam nagari tertinggal.

c. Tingkat Pendidikan

Kesadaran tentang pentingnya pendidikan terutama pendidikan 9 tahun baru terjadi beberapa tahun ini sehingga jumlah lulusan SD dan SLTP mendominasi peringkat Pertama.

d. Mata Pencarian

Mayoritas mata pencarian penduduk adalah petani dan buruh tani. Hal ini disebabkan karena sudah turun temurun sejak dulu bahwa masyarakat adalah petani dan juga minimnya tingkat pendidikan menyebabkan masyarakat tidak punya keahlian lain dan akhirnya tidak punya pilihan lain selain menjadi buruh tani dan buruh Pabrik.

e. Agama

Seluruh warga masyarakat Nagari Gunung Padang Alai adalah Muslim (Islam). Hal ini juga dibuktikan dengan tersebaranya 13 mesjid dan 94 mushalla di Nagari Gunung Padang Alai. Adapun di setiap korong memiliki beberapa mesjid dan sekitar 20 an mushalla. Kegiatan keagamaan di setiap korong ini bisa dikatakan masih ada. Terbukti dengan masih adanya guru mengaji dan anak-anak mengaji di tiap-tiap surau (mushalla). Selain itu kegiatan wirid yasinan sekali dua minggu yang diadakan oleh ibu-ibu di

Korong ini juga menandakan bahwa masyarakat di korong ini bisa dikatakan masyarakat yang agamis.

3.3. Kondisi Ekonomi Masyarakat Di Nagari Gunung Padang Alai Kabupaten Padang Pariaman

Tabel 3.5
Sumber Penerimaan Nagari

No.	Sumber Penerimaan Nagari	2013	2014	2015
1	Pajak	997,683	10,977,481	22,566,715
2	DPDK/ADD	-	-	778,162,921
3	Provinsi	12.000.000	12.000.000	12.000.000

Sumber, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Tahun 2012- 2016

Dari tabel diatas bisa disimpulkan bahwa:

1. Penerimaan Pajak, mulai tahun 2013 s/d 2014 mengalami peningkatan sebesar 60 %, sedangkan dari tahun 2014 ke 2015 sebesar 70 %.
2. DPD/K adalah Dana pembangunan Nagari yang bersumber dari pamerintah besaran dana tiap tahun bisa berubah sesuai dengan kebijakan PEMKAP.
3. Dana Provinsi adalah dana yang bersumber dari pemerintah provinsi setiap tahun. (RPJM, 2016)

Masyarakat Nagari Gunung Padang Alai merupakan masyarakat agraris yang menggantungkan hidupnya bekerja di bidang pertanian. Bencana gempa 30 September 2009 membawa perubahan yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat. Perubahan ini tidak hanya terlihat dari aspek fisik namun juga terlihat pada aspek non fisik seperti perubahan pada kehidupan sosial dan ekonomi. Suatu perubahan yang terjadi pada masyarakat nagari Gunung Padang Alai dapat diketahui dengan melakukan pengamatan terhadap keadaan sebelum dan sesudah gempa 30 september 2009.

Adapun bentuk- bentuk perubahan kehidupan sosial masyarakat Nagari Gunung Padang Alai pasca gempa 30 September 2009 yang didapatkan oleh peneliti adalah terjadinya perubahan kehidupan sosial ekonomi masyarakat pasca bencana gempa 30 September 2009 ditandai dengan semakin heterogennya kehidupan sosial seperti terbentuknya kelompok-kelompok baru dalam masyarakat berdasarkan hubungan kepentingan saja, terjadinya perubahan status sosial masyarakat. Di bidang ekonomi, dengan keterbatasan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa menyebabkan semakin beragamnya matapencaharian masyarakat dan terbukanya kesempatan kerja sehingga terjadinya perubahan pola kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Perubahan dalam kehidupan masyarakat Nagari Gunung Padang Alai merupakan proses sosial yang di alami oleh anggota masyarakat dan sistem sosial, di mana semua tingkat kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti perubahan lingkungan fisik yang disebabkan bencana alam gempa bumi 30 September 2009. Sehingga meninggalkan pola kehidupan dan sistem sosial yang lama kemudian menyesuaikan diri atau menggunakan pola-pola kehidupan sistem sosial yang baru agar tercapainya suatu keseimbangan pasca bencana gempa (Okwita 2009, hal 6-7)

3.4. Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari Gunung Padang Alai Kabupaten Padang Pariaman

Struktur merupakan suatu tatanan yang membentuk suatu kelompok dalam masyarakat. Struktur ini memiliki 2 (dua) ciri-ciri yakni:

- 1 Dapat berubah dan berkembang;
- 2 Ada di dalam masyarakat.

Satuan pemerintahan terkecil di Sumatera Barat adalah nagari, yang sudah ada sebelum kemerdekaan Indonesia. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, status nagari dihilangkan diganti dengan Desa, dan beberapa jorong ditingkatkan

statusnya menjadi desa. Kedudukan wali nagari juga dihapus dan administrasi pemerintahan dijalankan oleh para kepala desa. Namun sejak bergulirnya reformasi pemerintahan dan otonomi daerah, maka pada tahun 2001, istilah “Nagari” kembali digunakan di provinsi ini. Pemerintahan nagari merupakan suatu struktur pemerintahan yang otonom, punya teritorial yang jelas dan menganut adat sebagai pengatur tata kehidupan anggotanya, sistem ini kemudian disesuaikan dengan konstitusi yang berlaku di Indonesia. Sekarang pemerintahan Provinsi Sumatera Barat menetapkan pemerintah nagari sebagai pengelola otonomi daerah terendah untuk daerah kabupaten menggantikan istilah *pemerintahan desa* yang digunakan sebelumnya.

Sedangkan untuk nagari yang berada pada sistem pemerintahan kota masih sebagai lembaga adat belum menjadi bagian dari struktur pemerintahan daerah. Nagari pada awalnya dipimpin secara bersama oleh para penghulu atau datuk di nagari tersebut. Kemudian pada pemerintahan Hindia Belanda dipilih salah seorang dari para penghulu tersebut untuk menjadi wali nagari, kemudian dalam menjalankan pemerintahannya, wali nagari dibantu oleh beberapa orang kepala pemerintahannya, wali nagari dibantu oleh beberapa orang kepala jorong atau *wali jorong*, namun sekarang dibantu oleh *sekretaris nagari* (satnag) dan beberapa pegawai negeri sipil (PNS) bergantung dengan kebutuhan masing-masing nagari (Surya 2012, 557-558).

Nagari merupakan unit pemerintahan lokal terkecil di Sumatera Barat. Pemerintahan nagari terdiri dari seorang wali terpilih, sebuah badan legislatif terpilih dan sebuah badan yang terdiri dari wakil-wakil empat kelompok atau lebih yakni pemimpin adat, ulama, cerdik pandai dan wanita. Terdapat beberapa lembaga sebagai mitra kerja dari wali nagari:

1. Kerapatan Adat Nagari (KAN) dengan tugas utama mengurus masalah adat nagari yang bersendikan syarak, syarak yang bersendikan kitabullah, mengelolah kekayaan nagari dan menyelesaikan perselisihan masalahmasalah adat.

2. Majelis Ulama Nagari (MUNA) yang bertugas mengurus agama dan adat.
3. Badan Perwakilan Rakyat Nagari (BPRN) yang merupakan lembaga kontrol terhadap pekerjaan wali nagari. Lembaga ini tersebut sebagai legislatif nagari.
4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) yang bertugas menyusun Perencanaan Pembangunan Nagari.

Dengan adanya sistem pemerintahan nagari ini, tugas camat menjadi semakin ringan karena banyak bidang pekerjaan yang diambil alih wali nagari. Camat lebih berperan di dalam mengkoordinir pekerjaan yang wali nagari, baik yang berasal dari kearifan lokal maupun petunjuk dari pemerintahan kabupaten dan provinsi. Urusan administrasi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Misalnya menjadi wewenang wali nagari sekalipun yang menandatangani adalah Camat. Tentu saja tidak hanya itu, sekalipun berbeda dari nagari dulu yang sangat otonom dan tidak masuk dalam struktur negara. Saat ini terlihat tatanan sosial budaya masyarakat dan efektivitas pemerintahan teritorial mendorong terwujudnya kepentingan pelestarian nilai-nilai luhur adat disertai dengan penghormatan terhadap keragaman. Suasana demokratis dan egaliter selalu mewarnai hubungan pemimpin dengan masyarakat, baik di dalam menyelenggarakan pemerintahan maupun dalam urusan hukum adat (Adnan 2008, 152).

Pemerintahan Nagari dalam peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat no 9 tahun 2000 adalah kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintah tereendah tetapi tidak lagi berada di bawah camat karena Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Oleh karena itu pemerintahan Nagari berhak menyelenggarakan urusan rumah Nagari berdasarkan otonomi asli yang dimilikinya. Dalam hal ini pemerintah Nagari dapat mengemangkan peran serta seluruh masyarakat secara demokratis dengan memanfaatkan nilai-nilai budaya minangkabau serta peranan lembaga adat Nagari/kerapatan adat

Nagari dan lembaga lainnya sebagai mitra dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Adapun kegiatan utama yang dilakukan oleh pemerintahan nagari adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan Masyarakat
- b. Penyelenggaraan koordinasi
- c. Pembinaan perangkat nagari
- d. Pembinaan keamanan, ketentraman, kebersihan dan keteriban (K3)
- e. Kegiatan sekretaris
- f. Kegiatan rapat-rapat
- g. Kependudukan

